

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron Tahun 2022 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SDKP Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Pengaron sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat,baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Pengaron, 04 Januari 2023

Camat Pengaron,



Alipudin.S.sos, MM

NIP.196704021990021003

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A. Maksud dan Tujuan .....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	6
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	9
D. Isu Strategis .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Indikator Kinerja Utama .....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran .....	32
C. Realisasi Anggaran .....	36
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2019...	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran - Saran.....	45
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>46</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup berhasil** dengan capaian kinerja **80,19 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia

perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Pengaron berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Pengarona dalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Persentase(%)
APBD	Rp.2.888.247.037	Rp.2.805.247.037	100%

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN**

#### **A.1 Maksud Laporan**

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Pengaron
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Pengaron
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### **A.2 Tujuan Laporan**

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Pengaron kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Pengaron.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Pengaron

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (SKPD) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron Kab. Banjar Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pengaron.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

---

#### **B.1 KEDUDUKAN:**

Kecamatan Pengaron merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

---

#### **B.2 TUGAS:**

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

---

### B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

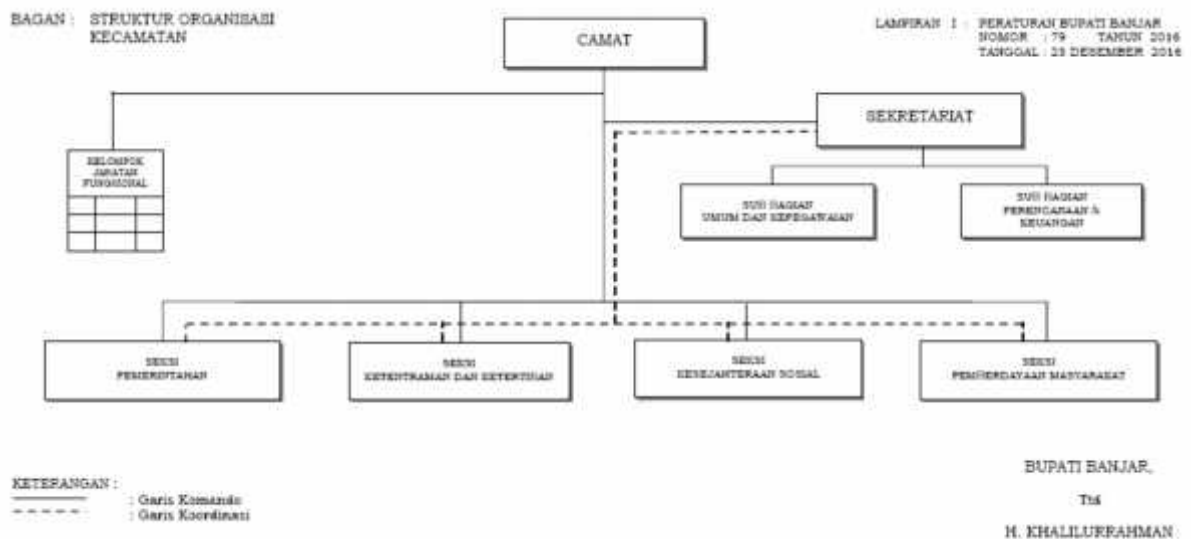
Susunan Organisasi Kecamatan Pengaron terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

**Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar**



### C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Pengaron yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Pengaron masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

**Tabel I**



**Tabel Permasalahan pada Kecamatan Pengaron**

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih Belum optimalnya pelayanan PATEN	Masih Rendahnya Penyelenggaraan Perizinan dan akuntabilitas kecamatan

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec.PengaronThn.2016-2021

#### **D. ISU STRATEGIS**

Kecamatan Pengaron secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Pengaron sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis

Kecamatan Pengaron dalam Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengaron Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Pengaron mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Pengaron mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron  
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yg tingkat penilaian masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara	( Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi ) x nilai penimbang  (Rujukan : Permenpan No. 14 Thn 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat )	Laporan Hasil Nilai Evaluasi Kecamatan

Sumber : SK IKU Kec.Pengaron Tahun 2022

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**KECAMATAN PENGARON**  
**TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
										(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	75						2,888,247,037.00	Camat
					a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotora	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	persen	100	2,719,166,037.00	Sekcam
					1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	persen	100	7,050,000.00	Sekcam
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	dokumen	6	405,000.00	Sekcam
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	660,000.00	Sekcam
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	500,000.00	Sekcam
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	825,000.00	Sekcam
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	660,000.00	Sekcam
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	dokumen	4	2,000,000.00	Sekcam

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen	2	2,000,000.00	Sekcam
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	2,335,992,837.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	Bulan	14	2,306,592,837.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD, Honorarium PPKeu, Honorarium PPTK, Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Pembantu Bendahara pengeluaran	Bulan	12	26,400,000.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	6	3,000,000.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
				3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	persen	100	10,500,000.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
					Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Laporan	5	1,500,000.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, (Honorarium Pengurus Barang Pengguna)	Bulan	12	9,000,000.00	Sekcam (Kasubag, Perencanaan dan Keuangan)
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	persen	100	11,500,000.00	Sekcam (Kasubag, Umum & Kepegawaian)

					Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Laporan	1	1,500,000.00	Sekcam (Kasubbag Umum & Kepegawaian)
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Orang	1	10,000,000.00	Sekcam (Kasubbag Umum & Kepegawaian)
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	41,750,200.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	2,000,000.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	5,000,000.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	7	1,478,400.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis	23	4,950,000.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Bulan	12	28,321,800.00	Sekcam
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	persen	100	21,900,000.00	Sekcam ( Kasubag.Perencanaan dan Keuangan )
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Jens	1	21,900,000.00	Sekcam ( Kasubag.Perencanaan dan Keuangan )
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	176,510,000.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	1,000,000.00	Sekcam

					Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Bulan	12	6,050,000.00	Sekcam
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	Bulan	12	169,460,000.00	Sekcam
						Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	13		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	persen	100	113,963,000.00	Sekcam ( Kasubag.Perencanaan dan Keuangan )
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Unit	10	74,933,000.00	Sekcam ( Kasubag.Perencanaan dan Keuangan )
					Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Jenis	4	5,730,000.00	Sekcam ( Kasubag.Perencanaan dan Keuangan )
					Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	Buah	1	33,300,000.00	Sekcam ( Kasubag.Perencanaan dan Keuangan )
					<b>b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Manusia Kecamatan Pengaron	index	81	31,769,400.00	Sekcam
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	persen	100	14,936,400.00	Sekcam
					Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	SOP	17	14,936,400.00	Sekcam



					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	persen	100	16,833,000.00	Kesos
					Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kegiatan	4	16,833,000.00	Kesos
					<b>c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>Pemberdayaan</b>
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	persen	100	67,000,000.00	Pemberdayaan
					sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	20,000,000.00	Pemberdayaan
						Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan	Desa	12		
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Kali	4	47,000,000.00	Pemberdayaan
						Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Buah	5		

						Jumlah Bundes yang Terdada Jumlah Kegiatan Pemberday aan Masyarakat yang diikuti dan dilaksana n Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Desa	12			
						Jumlah Bundes yang Terdada Jumlah Kegiatan Pemberday aan Masyarakat yang diikuti dan dilaksana n Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	UMKM	12			
					d.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penangan an Tramtibumlin mas	persen	100	10,125,600.00	Trantib
						Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penangan an Tramtibumlin mas	persen	100	5,821,600.00	Trantib
						sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikInd onesia,Tenta ra Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi	Kegiatan	1	5,821,600.00	Trantib
						Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penangan an Tramtibumlin mas	persen	100	4,304,000.00	Trantib

					sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik	Kegiatan	1	4,304,000.00	Trantib
					e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal	NA	0	42,354,400.00	Kesos
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi			42,354,400.00	Kesos
					Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Pengaron	Kegiatan	1	15,400,400.00	Kesos
					Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	26,954,000.00	Kesos
					f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen	100	17,831,600.00	Pemerintahan

					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen	100	17,831,600.00	Pemerintahan
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	Kegiatan	1	2,831,600.00	Pemerintahan
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pambakal )	Kegiatan	2	15,000,000.00	Pemerintahan

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja Thn.2022 Kec.Pengaron

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengaron tahun 2022 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Pengaron (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi (eselon III b dan IV).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Pengaron Kab. Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$<40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT	
			SATUAN	TARGET 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nial	84	84,75	99,11	Berhasil	
		Nilai Evaluasi Kecamatan	NILAI	75	57,95	74	Kurang berhasil	
	a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Adminstrasi Perkantoran	persen	100	100	100	Berhasil
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	persen	100	100	100	Berhasil
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	dokumen	6	6	100	Berhasil
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	1	100	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	1	100	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	1	100	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	dokumen	1	1	100	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	dokumen	4	4	100	Berhasil
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen	2	2	100	Berhasil
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	Berhasil
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	Bulan	14	14	100	Berhasil

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD,Honorarium PPKu,Honorarium PPTK,Honorarium Bendahara Pengeluaran,Honorarium Pembantu Bendahara pengeluaran	Bulan	12	12	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	6	6	100	Berhasil
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Laporan	5	5	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,(Honorarium Pengurus Barang Pengguna)	Bulan	12	12	100	Berhasil
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Laporan	1	1	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Orang	1	1	100	Berhasil
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	5	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	2	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	7	7	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis	23	23	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Bulan	12	12	100	Berhasil



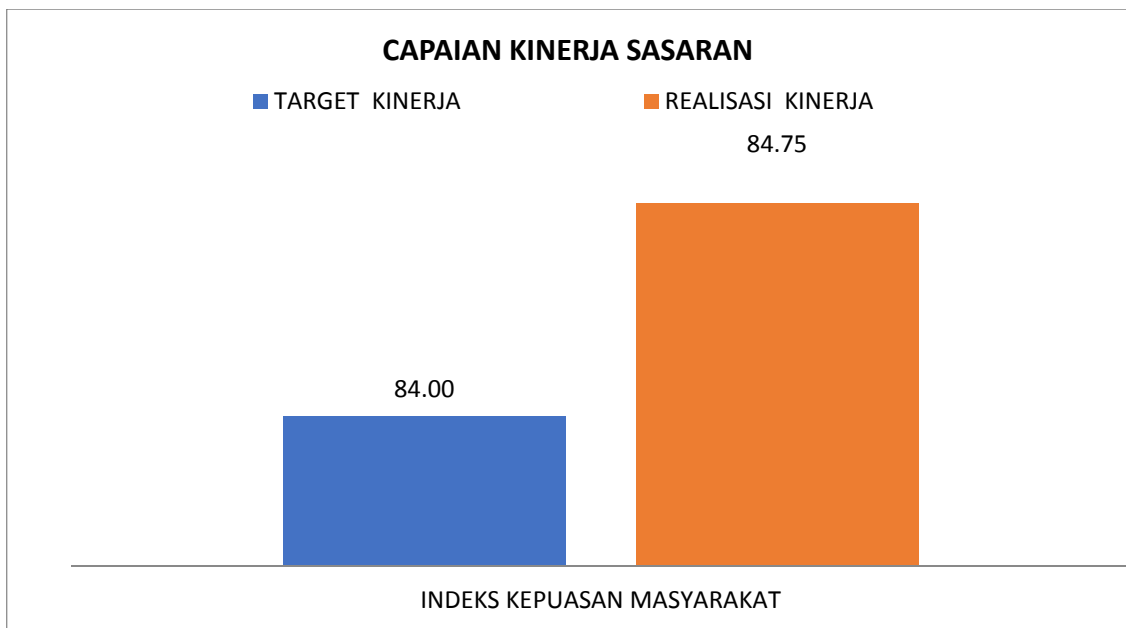
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Jens	1	1	100	Berhasil
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100	Berhasil
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Bulan	12	12	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	Bulan	12	12		
		Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	13	13	100	Berhasil
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Unit	10	10	100	Berhasil
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Jenis	4	4	100	Berhasil
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	Buah	1	1	100	Berhasil
<b>b.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron	index	81	81		Berhasil
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	SOP	17	17	100	Berhasil
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	persen	100	100	100	Berhasil

	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	100	Berhasil
c.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	persen	100	100	100	Berhasil
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	persen	100	100	100	Berhasil
	sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	2	100	Berhasil
		Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan	Desa	12	12		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Kali	4	4	100	Berhasil
		Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Buah	5	5		
		Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Desa	12	12		
		Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	UMKM	12	12		
d.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitas Penanganan Tramtibumlinmas</b>	persen	100			Berhasil

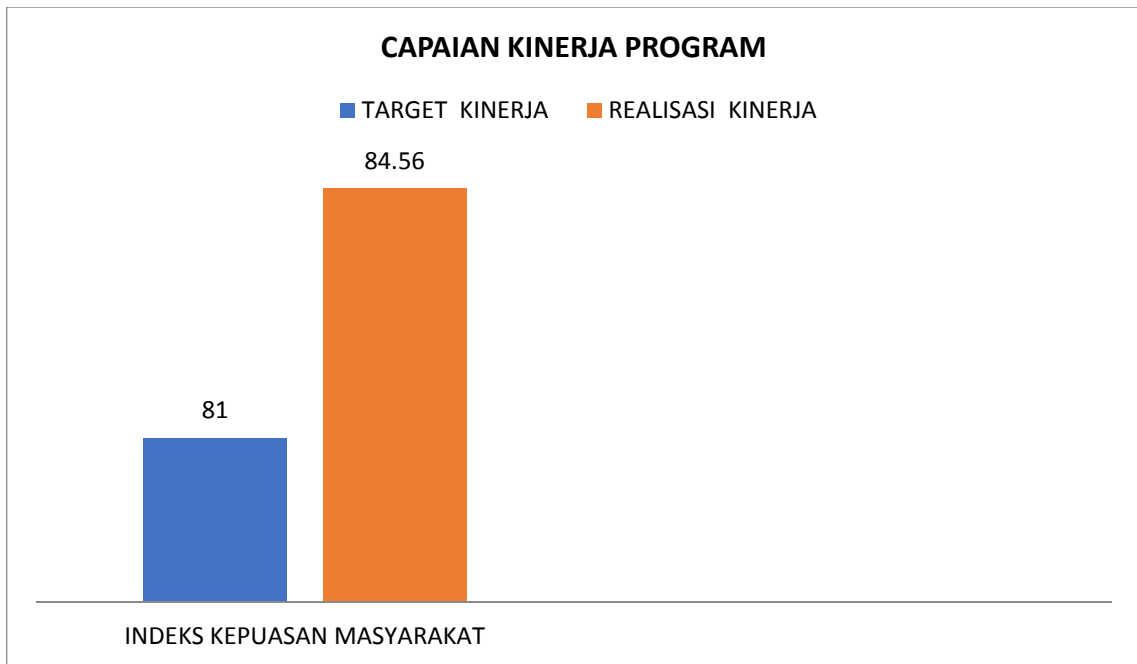
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	persen	100			Berhasil
	sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi	Kegiatan	1			Berhasil
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	persen	100			Berhasil
	sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik	Kegiatan	1			Berhasil
e.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal	NA	0	100	100	Berhasil
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi			100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Pengaron	Kegiatan	1	1	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	100	Berhasil
f.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen	100	100	100	Berhasil

	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen	100	100	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	Kegiatan	1	1	100	Berhasil
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pambakal )	Kegiatan	2	2	100	Berhasil

Sumber : Laporan SKM Kec.PengaronThn.2022



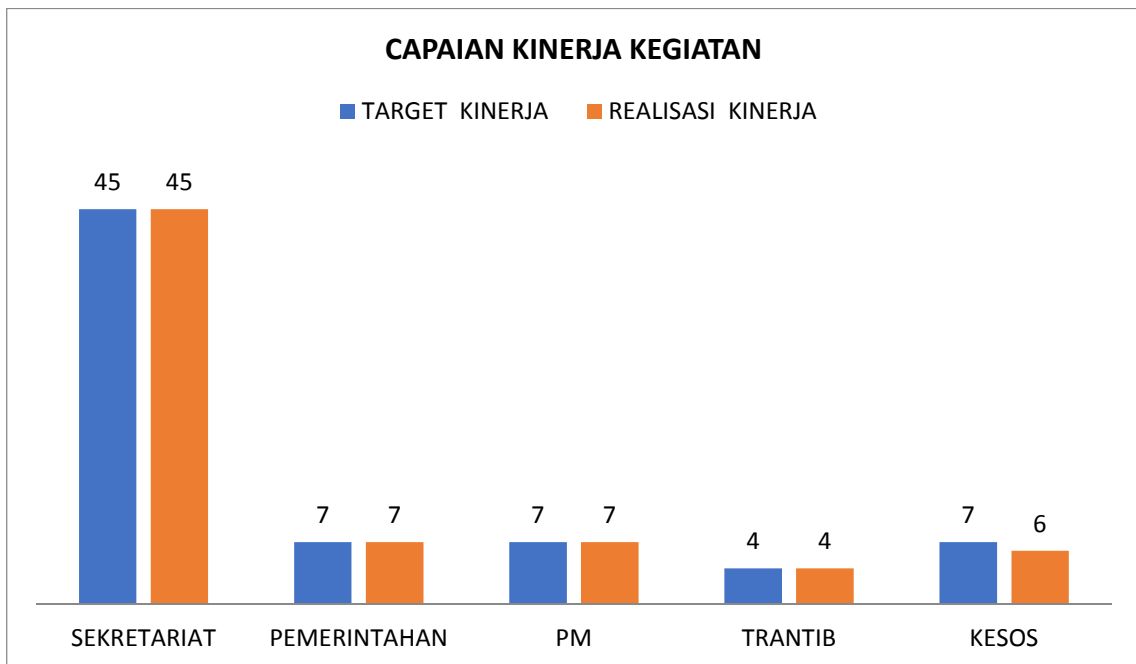
Indikator kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 84,75 , bila di bandingkan dengan target 84.00 maka capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,11% dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori **Berhasil**.



Indikator capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 84,56 bila di bandingkan dengan target 81.00 maka capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarkat sebesar 83,75% dengan capaian tersebut maka kineja masuk dalam kategori Cukup **Berhasil** sedangkan untuk indikator capaian program SAKIP Kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP Kecamatan masih belum ada atau belum keluar karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk nilai SAKIP sebesar 47,37 merupakan nilai SAKIP Tahun 2021 dengan target Tahun 2021 sebesar 67 dengan perincian penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	12.40
b.	Pengukuran Kinerja	25	14.00
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.60
d.	Evaluasi Internal	10	2.34
e.	Capaian Kinerja	20	3.13
	Nilai Hasil Evaluasi	57,95	<b>47,37</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>C</b>

maka di peroleh capaian kinerja nilai SAKIP tahun 2021 dengan capaian tersebut maka capaian kinerja masuk dalam kategori **Kurang Berhasil**.



1. Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi kinerja keseluruhan ada 45 Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 45 Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, adapun indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan adalah sebagai berikut :

) Laporan Administrasi Kepegawaian

Target 8 (delapan) laporan, realisasi 8 (delapan) laporan, Capaian Kinerja 100 % ( BERHASIL )

Laporan kegiatan terdiri dari :

1. Laporan Usul Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat
2. Laporan Kenaikan Gaji Berkala
3. Laporan Permintaan Cuti
4. Laporan pembuatan Kartu (Karis/Karsu, Kar[eg. Taspen)
5. Laporan Pembuatan DUK, Nominatif, Daftar Susunan Pegawai
6. SKP, SPJ, SPMT
7. Laporan Mutasi dan Promosi
8. Laporan Pemberhentian/Pensiun

- ) Laporan Penatausahaan Kantor  
Target 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar yang di buat setiap bulan, realisasi 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar, Capaian Kinerja 100% (BERHASIL)
- ) Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor  
Target 1 (satu) laporan, realisasi 1 (satu) laporan, capaian kinerja 100%, Laporan terdiri dari Laporan Kegiatan Belanja Modal
- ) Laporan Pelayanan PATEN  
Target 12 (dua belas) laporan, realisasi 12 (dua belas) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :
1. Laporan Pindah/Datang
  2. Laporan Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP
  3. Laporan Dispensasi/Rekomendasi Nikah
  4. Laporan Legalisasi Kesaksian Pernikahan
  5. Laporan Legalisasi Proposal
  6. Laporan Surat Keterangan Domisili
  7. Laporan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
  8. Laporan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  9. Laporan Keterangan Kematian
  10. Laporan Legalisasi Surat/SK
  11. Laporan Legalisasi Surat Keterangan Waris
  12. Laporan Izin Mengumpulkan Orang Banyak
- ) Laporan Barang Milik Daerah  
Target 2 (dua) laporan, realisasi 2 (dua) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), Laporan terdiri dari :
1. Laporan Semesteran
  2. Laporan Tahunan
- ) Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan  
Target 10 (sepuluh) jenis laporan, realisasi 10 (sepuluh) jenis laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :
1. Rencana Strategis (RENSTRA)

2. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)
6. Rencana Kerja (RENJA)
7. Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD)
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP)
10. Laporan Keuangan

) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Laporan Penatausahaan Kantor realisasi kinerja 7 laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 7 laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, laporan terdiri dari :

1. Laporan Pembinaan dan Lomba Administrasi Pemerintahan desa Rakor Pembakalan
2. Kegiatan Monitoring Tapal batas Desa
3. Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Sosialisasi Kegiatan PILKADES
5. Rakor Pambakalan
6. Laporan sosialisasi SOP pembuatan SKT
7. Laporan Koordinasi bidang Pemerintahan dengan Pambakal dan Muspika

) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan realisasi kinerja 7 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 7 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Kegiatan Pramusrenbang TK. Kecamatan
2. Laporan Kegiatan Musrenbang TK. Kecamatan
3. Laporan Kegiatan Evaluasi PERDES APBDes dan Perubhn
4. Laporan Pembinaan dan Evaluasi BUMDES



5. Laporan Kegiatan PKK Kecamatan
6. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan desa
7. Laporan Pembinaan Desa (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDES).

) Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan  
Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan realisasi kinerja 4 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 4 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama
2. Laporan Kegiatan Fasilitas/Dukungan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pilkada
3. Laporan Sosialisasi Perda
4. Laporan Pembinaan LINMAS

) Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan  
Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan realisasi kinerja 7 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 6 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 85,71 % dengan kategori **Cukup Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Keagamaan
3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan bidang Kepemudaan.
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan sehat
5. Laporan Kegiatan PUSKESSOS
6. Laporan Penanganan Bencana Alam.

Satu Kegiatan yang yang tidak bisa terlaksana yaitu MTQ hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang diambil oleg Pemerintah Daerah dengan Refucussing Anggaran hal ini menyebabkan teget kinerja tidak bisa terlaksana dengan maksimal.

---

## A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Pengaronse bagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	-	Persentase			Tidak Menjadi Indikator Lagi		Tidak Menjadi Indikator Lagi		Tidak Menjadi Indikator Lagi	
2	Persentase Pencapaian Target PAD	-	Persentase								
3	Persentase Penyelesaian Segmen Batas Desa	-	Persentase								
4	Persentase Penyelesaian Segmen Batas Kecamatan	-	Persentase								
5	Persentase Ketepatan Waktu Pemilihan Pembakal	-	Persentase	-	-						
6	Penyelesaian Tugas Umum Pemerintahan	-	Persentase	-	-						
7	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Indeks								
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	( Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi ) x nilai penimbang	Nilai					80.58	95.25%	84.75	99,11%

9	a. Laporan Administrasi Kepegawaian		Laporan	Belum Menjadi Indikator	5	62,5 %	8	100 %
	b. Laporan Penatausahaan Kantor		Laporan		12	100 %	12	100 %
	c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Laporan		-	-	1	100 %
	d. Laporan Pelayanan PATEN		Laporan		12	100 %	12	100 %
	e. Laporan Barang Milik Daerah		Laporan		2	100 %	2	100 %
	f. Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan		Jenis Laporan		10	100 %	10	100 %
10	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Jenis Laporan	5	100 %	7	100 %	
11	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		Jenis Laporan	6	100 %	7	100 %	
12	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan		Jenis Laporan	3	75 %	4	100 %	
13	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Jenis Laporan	6	14,28	6	100 %	

Sumber : Renstra Perubahan Kec.PengaronThn.2016-2021

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Kecamatan Pengaron menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran di mana Kecamatan Pengaron menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Capaian kinerja Sasaran Program Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 99,11 % di dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 95.25% maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja mencapai target tahun 2022.

Sedangkan untuk Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 masih belum bisa di sandingkan dengan capaian tahun 2021 karena sampai disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022.

Untuk capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan memiliki capaian kinerja sebesar 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan memiliki capaian kinerja sebesar 100%,

Capaian indikator kinerja Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kecamatan memiliki capaian kinerja sebesar 14,28%, hal ini masih sama disebabkan pada tahun 2021 adanya refussing anggaran sehingga untuk kegiatan MTQ tidak dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Pengaron hal ini berpengaruh pada capaian Kinerja, artinya semua indikator kinerja kegiatan tahun 2022 seluruhnya dapat terealisasi semua sesuai dengan target kegiatan.

**Tabel 3.4**  
**Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja**  
**Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021-2026**

SKPD : KECAMATAN PENGARON

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Target pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	4					5	-6		-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84	2.805.247.037	85	2.917.456.918	86	3.034.155.195	87	3.155.521.403	88,31	3.281.742.259	88,31	15.194.122.813	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan							Nilai Evaluasi Kecamatan		75	2.805.247.037	77	2.917.456.918	79	3.034.155.195	82	3.155.521.403	85	3.281.742.259	85	15.194.122.813	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
			7	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.619.364.237	100%	2.724.138.806	100%	2.833.104.359	100%	2.946.428.533	100%	3.064.285.674	100%	14.187.321.610	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
			7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		100%	7.050.000	100%	7.332.000	100%	7.625.280	100%	7.930.291	100%	8.247.503	100%	38.185.074	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
			7	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang		6 Dokumen	405.000	6 Dokumen	421.200	6 Dokumen	438.048	6 Dokumen	455.570	6 Dokumen	473.793	6 Dokumen	2.193.611	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

							Tersusun															
		7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun	1 dokumen	660.000	1 dokumen	686.400	1 dokumen	713.856	1 dokumen	742.410	1 dokumen	772.107	1 dokumen	3.574.773	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	1 dokumen	500.000	1 dokumen	520.000	1 dokumen	540.800	1 dokumen	562.432	1 dokumen	584.929	1 dokumen	2.708.161	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	1 dokumen	825.000	1 dokumen	858.000	1 dokumen	892.320	1 dokumen	928.013	1 dokumen	965.133	1 dokumen	4.468.466	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	1 dokumen	660.000	1 dokumen	686.400	1 dokumen	713.856	1 dokumen	742.410	1 dokumen	772.107	1 dokumen	3.574.773	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 dokumen	2.000.000	4 dokumen	2.080.000	4 dokumen	2.163.200	4 dokumen	2.249.728	4 dokumen	2.339.717	4 dokumen	10.832.645	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.080.000	2 Dokumen	2.163.200	2 Dokumen	2.249.728	2 Dokumen	2.339.717	2 Dokumen	10.832.645	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.330.472.837</b>	<b>100%</b>	<b>2.423.691.750</b>	<b>100%</b>	<b>2.520.639.420</b>	<b>100%</b>	<b>2.621.464.997</b>	<b>100%</b>	<b>2.726.323.597</b>	<b>100%</b>	<b>12.622.592.603</b>	Kec. Pengaron	<b>Ka. b. Banjar</b>
		7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	2.303.172.837	14 Bulan	2.395.299.750	14 Bulan	2.491.111.740	14 Bulan	2.590.756.210	14 Bulan	2.694.386.459	14 Bulan	12.474.726.997	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
		7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD, Honorarium PPKeu, Honorarium PPTK, Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Pembantu	12 Bulan	24.300.000	277 desa	25.272.000	277 desa	26.282.880	277 desa	27.334.195	277 desa	28.427.563	277 desa	131.616.638	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar





							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana			1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.400.000	1 Orang	10.816.000	1 Orang	11.248.640	1 Orang	11.698.586	1 Orang	54.163.226	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>31.428.400</b>	<b>100%</b>	<b>32.685.536</b>	<b>100%</b>	<b>33.992.957</b>	<b>100%</b>	<b>35.352.676</b>	<b>100%</b>	<b>36.766.783</b>	<b>100%</b>	<b>170.226.352</b>	Kec. Pengaron	<b>Ka b. Banjar</b>
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.080.000	5 Jenis	2.163.200	5 Jenis	2.249.728	5 Jenis	2.339.717	5 Jenis	10.832.645	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 Jenis	5.000.000	2 Jenis	5.200.000	2 Jenis	5.408.000	2 Jenis	5.624.320	2 Jenis	5.849.293	2 Jenis	27.081.613	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			7 Jenis	1.478.400	7 Jenis	1.537.536	7 Jenis	1.599.037	7 Jenis	1.662.999	7 Jenis	1.729.519	7 Jenis	8.007.491	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			23 Jenis	4.950.000	23 Jenis	5.148.000	23 Jenis	5.353.920	23 Jenis	5.568.077	23 Jenis	5.790.800	23 Jenis	26.810.797	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD			12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.720.000	12 Bulan	19.468.800	12 Bulan	20.247.552	12 Bulan	21.057.454	12 Bulan	97.493.806	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
							<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>2.410.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.506.400</b>	<b>100%</b>	<b>2.606.656</b>	<b>100%</b>	<b>2.710.922</b>	<b>100%</b>	<b>2.819.359</b>	<b>100%</b>	<b>13.053.337</b>	Kec. Pengaron	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli			1 Jenis	2.410.000	1 Jenis	2.506.400	1 Jenis	2.606.656	1 Jenis	2.710.922	1 Jenis	2.819.359	1 Jenis	13.053.337	Kec. Pengaron	
							<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>170.340.000</b>	<b>100%</b>	<b>177.153.600</b>	<b>100%</b>	<b>184.239.744</b>	<b>100%</b>	<b>191.609.334</b>	<b>100%</b>	<b>199.273.707</b>	<b>100%</b>	<b>922.616.385</b>	Kec. Pengaron	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.040.000	12 Bulan	1.081.600	12 Bulan	1.124.864	12 Bulan	1.169.859	12 Bulan	5.416.323	Kec. Pengaron	

		7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	3.900.000	12 Bulan	4.056.000	12 Bulan	4.218.240	12 Bulan	4.386.970	12 Bulan	4.562.448	12 Bulan	21.123.658	Kec. Pengaron		
		7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	12 Bulan	165.440.000	12 Bulan	172.057.600	12 Bulan	178.939.904	12 Bulan	186.097.500	12 Bulan	193.541.400	12 Bulan	896.076.404	Kec. Pengaron		
								Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Bulan		13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	Kec. Pengaron		
		7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</b>	100%	55.663.000	100%	57.889.520	100%	60.205.101	100%	62.613.305	100%	65.117.837	100%	301.488.763	Kec. Pengaron		
		7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	10 Unit	49.933.000	10 Unit	51.930.320	10 Unit	54.007.533	10 Unit	56.167.834	10 Unit	58.414.547	10 Unit	270.453.234	Kec. Pengaron		
		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	5.730.000	4 Jenis	5.959.200	4 Jenis	6.197.568	4 Jenis	6.445.471	4 Jenis	6.703.290	4 Jenis	31.035.528	Kec. Pengaron		
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Manusia Kecamatan Pengaron</b>	80,19	81,00	54.795.600	82,00	56.987.424	83,00	59.266.921	84,00	61.637.598	85,00	64.103.102	85,00	296.790.644	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
		7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan</b>	100%	14.936.400	100%	15.533.856	100%	16.155.210	100%	16.801.419	100%	17.473.475	100%	80.900.360	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 SOP	14.936.400	17 SOP	15.533.856	17 SOP	16.155.210	17 SOP	16.801.419	17 SOP	17.473.475	17 SOP	80.900.360	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	

							Kecamatan																	
			7	1	2	2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	-	100%	39.859.200	100%	41.453.568	100%	43.111.711	100%	44.836.179	100%	46.629.626	100%	215.890.284	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar	
			7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan		4 Kegiatan	39.859.200	4 Kegiatan	41.453.568	4 Kegiatan	43.111.711	4 Kegiatan	44.836.179	4 Kegiatan	46.629.626	4 Kegiatan	215.890.284	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	NA	100%	45.000.000	100%	46.800.000	100%	48.672.000	100%	50.618.880	100%	52.643.635	100%	243.734.515	Kec. Pengaron	
			7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu		100%	45.000.000	100%	46.800.000	100%	48.672.000	100%	50.618.880	100%	52.643.635	100%	243.734.515	Kec. Pengaron	
			7	1	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan		2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.800.000	2 Kegiatan	21.632.000	2 Kegiatan	22.497.280	2 Kegiatan	23.397.171	2 Kegiatan	108.326.451	Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar
									Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan		12 Desa		12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa		Kec. Pengaron	Ka. b. Banjar	

							Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta												4 Kali	25.000.000	4 Kali	26.000.000	4 Kali	27.040.000	4 Kali	28.121.600	4 Kali	29.246.464	4 Kali	135.408.064	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
								Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta												5 Buah		5 Buah	0	5 Buah	0	5 Buah	0	5 Buah	0	5 Buah	0	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar
								Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta												12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		Kec. Pengaron	
								Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta												12 UMK M		12 UMK M		12 UMK M		12 UMK M		12 UMK M		12 UMK M		Kec. Pengaron	
			7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penanganan Trambumlimnas	NA	100%	13.429.600	100%	13.966.784	100%	14.525.455	100%	15.106.474	100%	15.710.733	100%	15.710.733	100%	72.739.045	100%	72.739.045	100%	72.739.045	100%	72.739.045	100%	72.739.045	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar

		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Fasilitas Penanganan Tramitubumlinmas	100%	9.125.600	100%	9.490.624	100%	9.870.249	100%	10.265.059	100%	10.675.661	100%	49.427.193	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	5.821.600	1 Kegiatan	6.054.464	1 Kegiatan	6.296.643	1 Kegiatan	6.548.508	1 Kegiatan	6.810.449	1 Kegiatan	31.531.663	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 Kegiatan	3.304.000	1 Kegiatan	3.436.160	1 Kegiatan	3.573.606	1 Kegiatan	3.716.551	1 Kegiatan	3.865.213	1 Kegiatan	17.895.530	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Penanganan Tramitubumlinmas	100%	4.304.000	100%	4.476.160	100%	4.655.206	100%	4.841.415	100%	5.035.071	100%	23.311.852	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	4.304.000	1 Kegiatan	4.476.160	1 Kegiatan	4.655.206	1 Kegiatan	4.841.415	1 Kegiatan	5.035.071	1 Kegiatan	23.311.852	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal	NA	0	42.354.400	0	44.048.576	0	45.810.519	0	47.642.940	0	49.548.657	0	229.405.092	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar

							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi															
		7	1	5	2,01				0	42.354.400	0	44.048.576	0	45.810.519	0	47.642.940	0	49.548.657	0	229.405.092	Kec. Pengaron		
		7	1	5	2,01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Simpang Empat	1 Kegiatan	15.400.400	1 Kegiatan	16.016.416	1 Kegiatan	16.657.073	1 Kegiatan	17.323.356	1 Kegiatan	18.016.290	1 Kegiatan	83.413.534	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	5	2,01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	26.954.000	3 Kegiatan	28.032.160	3 Kegiatan	29.153.446	3 Kegiatan	30.319.584	3 Kegiatan	31.532.368	3 Kegiatan	145.991.558	Kec. Pengaron	Ka b. Banjar	
		7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>30.303.200</b>	<b>100%</b>	<b>31.515.328</b>	<b>100%</b>	<b>32.775.941</b>	<b>100%</b>	<b>34.086.979</b>	<b>100%</b>	<b>35.450.458</b>	<b>100%</b>	<b>164.131.906</b>	Kec. Pengaron	<b>Ka b. Banjar</b>

		7	1	6	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		100%	30.303.200	100%	31.515.328	100%	32.775.941	100%	34.086.979	100%	35.450.458	100%	164.131.906	Kec. Pengaron	<b>Ka b. Ba nja r</b>
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi		2 Kegiatan	5.731.600	2 Kegiatan	5.960.864	2 Kegiatan	6.199.299	2 Kegiatan	6.447.271	2 Kegiatan	6.705.161	2 Kegiatan	31.044.194	Kec. Pengaron	Ka b. Ba nja r
		7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi		1 Kegiatan	2.831.600	1 Kegiatan	2.944.864	1 Kegiatan	3.062.659	1 Kegiatan	3.185.165	1 Kegiatan	3.312.571	1 Kegiatan	15.336.859	Kec. Pengaron	Ka b. Ba nja r
		7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pambakal )		2 Kegiatan	15.000.000	2 Kegiatan	15.600.000	2 Kegiatan	16.224.000	2 Kegiatan	16.872.960	2 Kegiatan	17.547.878	2 Kegiatan	81.244.838	Kec. Pengaron	Ka b. Ba nja r
		7	1	6	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan		5 Kegiatan	6.740.000	5 Kegiatan	7.009.600	5 Kegiatan	7.289.984	5 Kegiatan	7.581.583	5 Kegiatan	7.884.847	5 Kegiatan	36.506.014	Kec. Pengaron	Ka b. Ba nja r



### A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2022 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2022, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Pengaron selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Periode Akhir Renstra (2022)	Capaian Periode Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	( Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi ) x nilai penimbang	Indeks	84.75	84.00	100%
Tertelaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat	( Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi ) x nilai penimbang	Indeks	84.75	84.00	100%
	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	.....	.....	0%
Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	Realisasi / Rencana ( Target ) x 100 %	Laporan	8	8	100%
	Laporan Penatausahaan Kantor		Laporan	12	12	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Laporan	1	1	100%
	Laporan Pelayanan PATEN		Laporan	12	12	100%

	Laporan Barang Milik Daerah		Laporan	2	2	100%
	Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan		Jenis Laporan	10	10	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Realisasi / Rencana ( Target) x 100 %	Jenis Laporan	4	4	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Realisasi / Rencana ( Target) x 100 %	Jenis Laporan	7	7	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan	Realisasi / Rencana ( Target) x 100 %	Jenis Laporan	4	4	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Realisasi / Rencana ( Target) x 100 %	Jenis Laporan	7	7	100%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.PengaronThn.2020

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir di atas menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Sasaran Program Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 84.75 sudah bisa mencapai target akhir priode renstra yakni 84 di tahun 2022.

Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk indikator kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022 semua indikator kegiatan telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2022.

#### A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DAN TARGET NASIONAL

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022  
Target Provinsi Dan Nasional

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6

Sumber :

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Pengaron dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible target Provinsi maupun nasional tersebut.

#### B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,

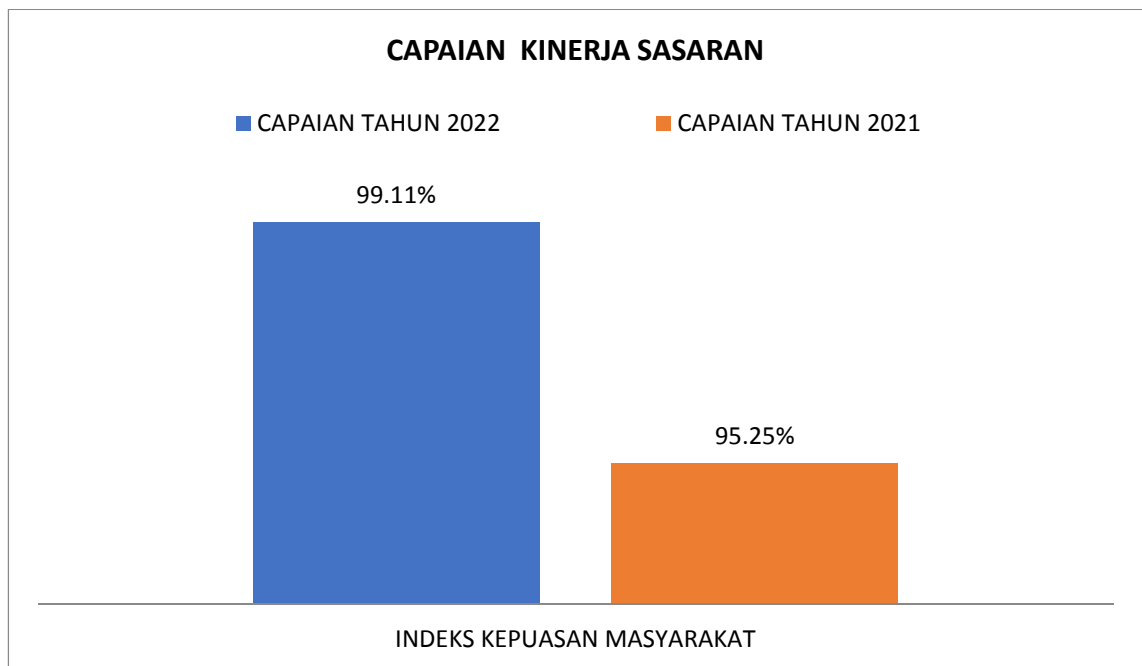
Pada tahun 2021 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat , terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Cukup berhasil** . Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

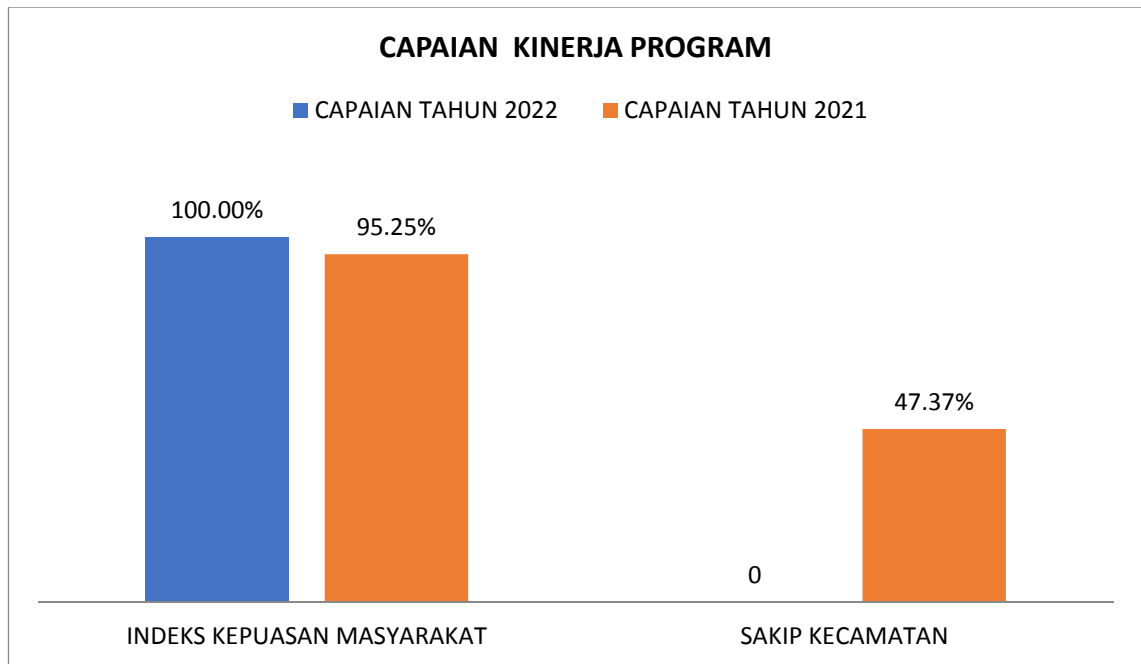
**Tabel 3.6**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%) Thn. 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.00	80.58	95.25%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Thn.2021 dan LkjIP Thn.2021 Kec.Pengaron



Capaian kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 99,11% di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 95,25 % maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja.



**Faktor penghambat keberhasilan sasaran/program :**

Untuk tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron realisasi sebesar 84.75 dari target 84.00 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori (**Berhasil**) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 95.25% maka pada tahun 2021 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja. Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2021 adalah mendapatkan nilai 47,37.

Penghambat tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarkat diketahui dari hasil survey yang dilakukan terhadap 100 responden yang melakukan pelayanan di kecamatan Pengaronpada bulan Januari sampai dengan Desember 2022, dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan menjadi penyebab tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey diperoleh nilai unsur pelayanan yang terendah adalah :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur pelayanan
- c. Waktu penyelesaian pelayanan

- d. Produk pelayanan
  - e. Kompetensi pelaksana
  - f. perilaku pelaksana
  - g. sarana & prasarana
- dengan nilai sebesar 3,22.

Tidak terlaksananya pelayanan publik secara maksimal dimana faktor-faktor yang disebutkan di atas menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga dimana untuk menyelesaikan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga operator/Petugas e-KTP terkadang masih terkendala kurang lancarnya koneksi dgn server Disdukpencapil sehingga petugas harus melakukan perekam KTP dan Kartu Keluarga di Disdukpencapil Kabupaten yang mengakibatkan memerlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah dokumen.

**Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:**

1. Mempercepat waktu pelayanan terhadap masyarakat yang datang untuk melakukan pelayanan
2. Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana pelayanan online yang disediakan oleh Disdukpencapil Kabupaten

**Upaya perbaikan :**

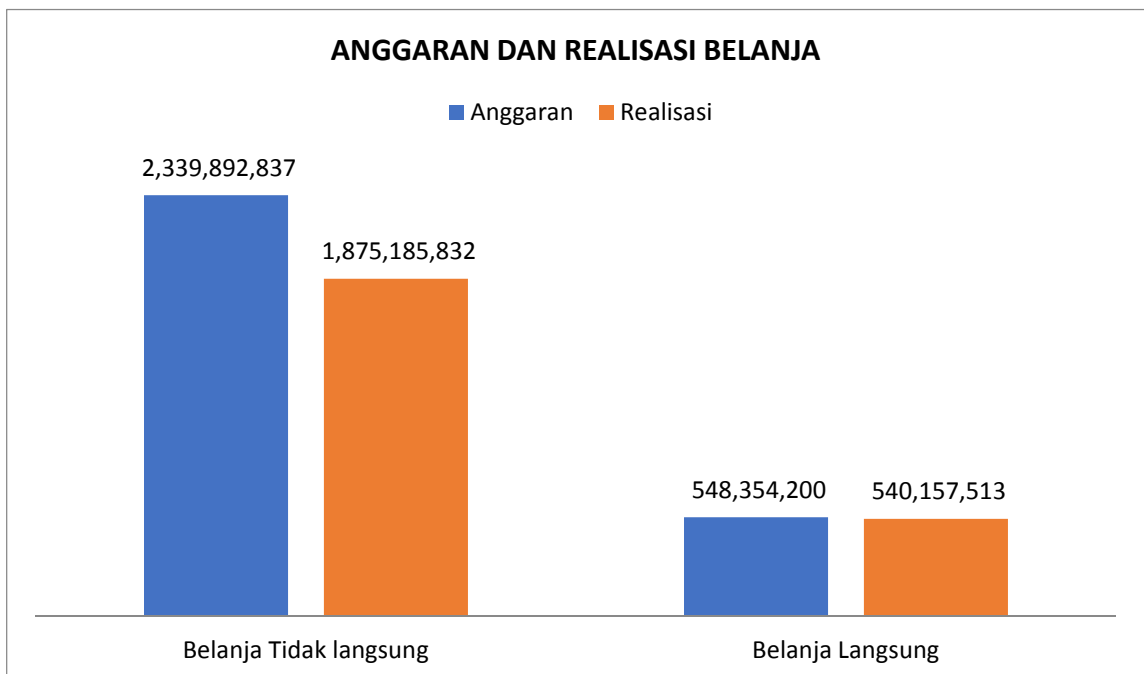
Menyederhanakan persyaratan dan prosedur pelayanan dan mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kapasitas pelaksana pelayanan melalui bimtek dan pelatihan termasuk kualitas pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai sehingga apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.

### Tindak lanjut yang akan datang:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk anggaran pemeliharaan komputer pembuatan KTP sehingga ketika ada kerusakan dapat segera di perbaiki.
2. Memaksimalkan fasilitas jaringan internet di kecamatan agar apabila ada kendala dengan server masih bisa melakukan pelayanan secara online untuk pembuatan dokumen kependudukan.

## C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Pengaron tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.872.176.287,- dengan realisasi Anggaran Rp. 2.428.173.138,- (84.54%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dengan anggaran sebesar Rp 2.339.892.837,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.875,185,832 (80.14%) dan untuk belanja langsung (belanja barang dan jasa) dengan anggaran sebesar Rp. 548.354.200,- dengan realisasi sebesar Rp 540.157.513,-(98,50%).



**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator Kegiatan	Fisik	Keuangan	Indikator Kegiatan	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD;	100	7.050.000	100 Persen	57,14	1.285.000	0 Persen	57,14	18,23		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	100	2.335.992.837	100 Persen	78,33	1.692.914.519	0 Persen	78,33	72,47		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun;	100	10.500.000	100 Persen	97,50	9.000.000	0 Persen	97,50	8,57		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi;	100	11.500.000	100 Persen	47,50	350	0 Persen	47,50	3,04		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah;	100	41.750.200	100 Persen	38,50	3.230.780	0 Persen	38,50	7,74		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah;	100	21.900.000	100 Persen	50,00	3.181.500	0 Persen	50,00	14,53		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	100	176.510.000	100 Persen	65,33	11.352.150	0 Persen	65,33	6,43		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah;	100	113.963.000	100 Persen	53,33	43.621.453	0 Persen	53,33	38,28		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;	100	14.936.400	100 Persen	100,00	100	0 Persen	100,00	0,67		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos Yang dilaksanakan;	100	16.833.000	100 Persen	95,00	1.915.000	0 Persen	95,00	11,38		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;	100	67.000.000	100 Persen	100,00	12.850.000	0 Persen	100,00	19,18		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;	100	5.821.600	100 Persen	0,00	0	0 Persen	0,00	0,00		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi;	100	4.304.000	100 Persen	100,00	119	0 Persen	100,00	2,76		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi;	100	42.354.400	100 Persen	0,00	0	0 Persen	0,00	0,00		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;	100	17.831.600	100 Persen	50,00	381.6	0 Persen	50,00	2,14		0 Faktor penghambat : Faktor pendorong :

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kec.PengaronThn.2022 aplikasi Simondalev

### C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 6 (enam) kegiatan menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100%.



Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8  
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan DAerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100%	0 %
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	100 %	99,83%	0,17 %
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100 %	0 %
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	100%	100%	0%
5.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	100 %	100%	0%
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan	100 %	100%	0%

## D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

### D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2021

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron Tahun 2021 memperoleh nilai 47,37 dengan interpretasi predikat C ( kurang). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2021 direkomendasikan kepada Camat Pengaron hal-hal sebagai berikut :

1. Belum dibuatnya Rencana Aksi atas kinerja;Terdapat dokumen perencanaan seperti RENSTRA, RENJA, PK dan Rencana Aksi namun dalam pelaksanaanya perencanaan Kinerja yang belum diimplementasikan seperti belum terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik dokumen renja yang belum dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran serta renstra dan PK Belum dipublikasikan.
2. Pengukuran kinerja telah dilkakukan namun pengumpulan data kinerja atas seluruh target yang ada dalam rencana aksi belum sepenuhnya diukur realisasinya berkala , IKU be;um dimanfaatkan ke dalam dokumen penganggaran, hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment serta Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan;
3. Laporan Kinerja sudah menyajikan Inpormasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcame, namun laporan belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisa efisiensi penggunaan anggaran dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment ;
4. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya namun tidak terdapat analisa pencapaian kinerja terhadap evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan dan evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya menyajikan mengenai

keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan merekomendasikan telah /akan di tindak lanjuti;

---

## D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Pengaron telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring target jangka menengah dalam Renstra secara periodik, menjadikan dokumen renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran serta renstra dan PK untuk dapat dipublikasikan ke dalam website perangkat daerah;
2. Pengumpulan data kinerja atas seluruh target yang ada dalam rencana aksi diukur realisasinya secara berkala dalam penyusunan dokumen penganggaran untuk mencantumkan IKU Perangkat Daerah, hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar system reward dan punishment serta mempublikasikan Indikator Kinerja Utama kedalam website Perangkat Daerah.
3. Laporan Kinerja Untuk dapat di Upload kedalam website Perangkat Daerah, menyajikan informasi analisa tentang efisiensi pengguna anggaran dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan Kinerja dapat dijadikan dasar reward dan punishment.
4. Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantuan aksi dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana aksi untuk menyajikan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dengan disertai bukti yang cukup rekomendasi telah akan ditindaklanjuti.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Pengaronmasuk dalam kategori **Cukup Berhasil** dengan target 84.00 dan realisasi 84.75 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 99,11% dengan pagu anggaran Program sebesar Rp. 2.872.176.287,- realisasi anggaran sebesar Rp.2.428.173.138,- atau sebesar 84.54%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai perlu di tingkatkan agar apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.
2. Masih terkendalanya jaringan internet di kecamatan Pengaronsehingga pelayanan online oleh Disdukpencahil belum bisa di manfaatkan secara maksimal
3. Belum adanya pelatihan ataupun bimbingan teknis oleh bidang Pemerintahan terhadap petugas Paten sementara perangkat komputer untuk aplikasi SIMPATEN telah tersedia sehing pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal.

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang memperoleh nilai unsur pelayanan tertinggi adalah unsur Persyaratan pelayanan (4.00) sedangkan nilai unsur pelayanan terendah ada pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Persyaratan
  - b. Prosedur pelayanan
  - c. Waktu penyelesaian pelayanan
  - d. Produk pelayanan
  - e. Kompetensi pelaksana
  - f. perilaku pelaksana
  - g. sarana & prasarana
- dengan nilai sebesar 3,03.

## **B. SARAN-SARAN**

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
3. Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022